

ABSTRAK

Putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tidak menjamin mudah saat pelaksanaannya. Oleh karena itu, terdapat dua putusan yang dijadikan sebagai bahan perbandingan yakni Putusan No. No. 1103/Pdt.G/2019/PN.Tng dan Putusan No. 175/Pdt.G/2017/PN.Sby terkait dengan perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*). Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan perbandingan hukum permasalahan eksekusi kedua perkara tersebut dan juga upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menuntaskan perkara tersebut.

Metode penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, kemudian dilakukan analisis secara preskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk menjamin suatu putusan dilaksanakan, pihak yang menang dapat melakukan beberapa upaya hukum maupun non hukum untuk melawan badan hukum publik yaitu pejabat daerah. Kewenangan mengadili Putusan No. No. 1103/Pdt.G/2019/PN.Tng dan Putusan No. 175/Pdt.G/2017/PN.Sby masih dalam lingkup Pengadilan Negeri/Peradilan umum. Sedangkan untuk selanjutnya setelah adanya Perma 2 Tahun 2019 perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa secara khusus diperiksa dan diadili dalam hanya dalam ruang lingkup Peradilan Tata Usaha Negara.

Kata Kunci : Putusan, Eksekusi, dan Perbuatan Melawan Hukum.

ABSTRAC

A judge's decision that has permanent legal force(*inkracht van gewijsde*) does not guarantee easy implementation. Therefore, there are two decisions that are used as comparison materials, namely Decision No. 1103/Pdt.G/2019/PN.Tng and Decision No. 175/Pdt.G/2017/PN.Sby related to cases of unlawful acts committed by local governments or authorities(*onrechtmatige overheidsdaad*). Thus, the author is interested in conducting a legal comparison of the problems of the execution of the two cases and also the legal efforts that can be made to resolve the case.

This legal research method is normative legal research using a statutory approach and case approach, then prescriptively analyzed.

The results of this study show that to ensure that a decision is implemented, the winning party can take several legal and non-legal remedies against the local government. The authority to adjudicate Decision No. 1103/Pdt.G/2019/PN.Tng and Decision No. 175/Pdt.G/2017/PN.Sby is still within the scope of the district court or general court. Whereas henceforth after the existence of Perma 2 Year 2019, unlawful acts committed by the authorities are specifically examined and tried only within the scope of the State Administrative Court.

Keywords: Decision, Execution, and Unlawful Acts.